

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Pemikiran	9
1.5. Sistematika Penulisan	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Perikanan.....	18
2.1.1. Pegertian Tindak Pidana.....	18
2.1.2. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Perikanan	21

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan	26
2.2. Penegakan Hukum dalam Bidang Perikanan	32
2.2.1. Urgensi Penegakan Hukum di Bidang Perikanan	32
2.2.2. Kerangka Hukum Penegakan di Bidang Perikanan ..	34
2.2.3. Institusi Penegak Hukum di Bidang Perikanan	35
2.3. Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut	36
2.3.1. Pengertian TNI AL.....	36
2.3.2. Kewenangan TNI AL	37
2.3.3. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL.....	42
2.4. Penelitian Terdahulu yang Relevan	50

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	55
3.2. Pendekatan Penelitian	55
3.3. Data dan Sumber Data	56
3.4. Subjek dan Objek Penelitian	57
3.5. Teknik Pengumpulan Data	57
3.6. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian tentang Gambaran Umum Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap.....	60
4.1.1. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap.....	60
4.1.2. Kegiatan Operasional Staf Operasi Lanal Cilacap	

dalam Pengawasan dan Penindakan Kejahatan	
Perikanan	62
4.2. Pembahasan	66
4.2.1. Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum	
Kejahatan Perikanan Dihubungkan dengan Pasal	
73 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 di Wilayah	
Perairan Cilacap	66
4.2.2. Kendala-kendala dalam Kewenangan TNI AL	
dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan	
Dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45	
Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah	
Perairan Cilacap	71
4.2.3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi	
Kendala-Kendala dalam Kewenangan TNI AL	
Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan	
Dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45	
Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah	
Perairan Cilacap	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	51
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dan Hasil Wawancara	91
--	----